



Kebijakan Ekspor Kayu, Perekonomian, dan Kesempatan Kerja Industri Jawa Timur

Nasrullah Umar¹, Dimas Satrio Nugroho², Arya Kusuma Dewa³, Riessa Putra Christianto⁴

¹⁻⁴Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, STIE Mahardhika
dimasnugroho@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan ekspor kayu dan kondisi perekonomian terhadap peningkatan kesempatan kerja pada industri pengolahan kayu di Jawa Timur. Industri pengolahan kayu memiliki posisi penting karena menghubungkan sumber daya kehutanan, kegiatan manufaktur, perdagangan, dan penyerapan tenaga kerja. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei terhadap 61 responden yang terdiri atas pelaku usaha, pekerja, dan pihak yang berkaitan dengan industri pengolahan kayu. Sampel ditentukan melalui purposive sampling, sedangkan data dikumpulkan menggunakan kuesioner berskala Likert dan dianalisis dengan regresi linear berganda. Hasil statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata kebijakan ekspor kayu sebesar 3,42, kondisi perekonomian sebesar 3,89, dan kesempatan kerja sebesar 3,40. Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 0,600 + 0,987X_1 - 0,147X_2$. Secara parsial, kebijakan ekspor kayu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja dengan nilai t sebesar 6,534 dan signifikansi 0,000. Kondisi perekonomian memiliki koefisien negatif, tetapi tidak berpengaruh signifikan secara parsial dengan nilai signifikansi 0,191. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja dengan nilai F sebesar 22,470 dan signifikansi 0,000. Nilai R -squared sebesar 0,437 menunjukkan bahwa 43,7 persen variasi kesempatan kerja dapat dijelaskan oleh kebijakan ekspor kayu dan kondisi perekonomian. Temuan menegaskan pentingnya kebijakan ekspor yang konsisten, mudah diakses, berorientasi pada peningkatan nilai tambah, serta disertai penguatan kapasitas usaha agar pertumbuhan ekspor mampu menghasilkan pekerjaan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Ekspor Kayu, Kondisi Perekonomian, Kesempatan Kerja, Industri Pengolahan Kayu, Jawa Timur

1. Latar Belakang

Industri pengolahan kayu merupakan bagian penting dari struktur manufaktur karena mengubah bahan baku kehutanan menjadi produk bernilai tambah, seperti kayu gergajian, panel, komponen bangunan, kerajinan, dan furnitur. Kegiatan tersebut menciptakan mata rantai produksi yang melibatkan pemasok bahan baku, pengangkutan, pengeringan, pemotongan, perakitan, penyelesaian produk, pengemasan, hingga distribusi. Karakter rantai usaha yang panjang menjadikan industri ini relevan bagi penciptaan kesempatan kerja langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks Jawa Timur, keberadaan basis manufaktur, pelabuhan, jaringan perdagangan, serta industri mikro, kecil, menengah, dan besar memberikan peluang bagi pengembangan industri pengolahan kayu yang berorientasi pasar domestik dan ekspor. Publikasi statistik Jawa Timur juga menempatkan ekspor, industri, dan ketenagakerjaan sebagai indikator utama untuk membaca dinamika perekonomian daerah [11], [12].

Kebijakan ekspor memiliki fungsi strategis karena menentukan akses pasar, persyaratan legalitas, biaya kepatuhan, prosedur administrasi, dan kepastian usaha. Pada produk kayu, kebijakan tidak hanya berhubungan dengan perdagangan, tetapi juga dengan tata kelola sumber daya, penelusuran asal bahan, dan penerimaan produk di negara tujuan. Sistem verifikasi legalitas kayu dapat memperkuat kredibilitas produk Indonesia, tetapi penerapannya perlu mempertimbangkan kapasitas perusahaan, khususnya usaha kecil dan menengah, agar kewajiban administratif tidak berubah menjadi hambatan masuk pasar. Penelitian mengenai lisensi legalitas kayu Indonesia menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara sasaran tata kelola hutan dan keberlangsungan industri pengolahan [1]. Karena itu, kebijakan ekspor yang efektif tidak cukup dinilai dari ketat atau longgarnya aturan, melainkan dari kemampuannya menciptakan kepastian, efisiensi, dan insentif peningkatan nilai tambah.

Hubungan ekspor dengan kesempatan kerja berlangsung melalui beberapa jalur. Permintaan ekspor yang meningkat dapat menaikkan utilisasi kapasitas, memperpanjang jam operasi, memperluas jaringan pemasok, dan mendorong perusahaan merekrut tenaga produksi, administrasi, pemasaran, serta logistik. Kajian lintas negara menunjukkan bahwa aktivitas ekspor mendukung pekerjaan domestik melalui keterkaitan antarsektor dalam rantai produksi [2]. Di tingkat perusahaan, program promosi ekspor dapat memperkuat sumber daya, kapabilitas, strategi pemasaran, dan daya saing eksportir Indonesia [3], [4]. Namun, peningkatan ekspor tidak otomatis menghasilkan pekerjaan dalam jumlah yang sama pada setiap perusahaan. Dampak tersebut dipengaruhi teknologi produksi,

intensitas tenaga kerja, ketersediaan bahan baku, kapasitas modal, kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan memenuhi standar pasar.

Kondisi perekonomian juga diperkirakan memengaruhi kesempatan kerja. Pertumbuhan permintaan, stabilitas harga, akses pembiayaan, nilai tukar, biaya energi, dan tingkat investasi membentuk lingkungan operasi perusahaan. Pada kondisi yang stabil, perusahaan mempunyai dasar yang lebih kuat untuk merencanakan produksi dan perekrutan. Sebaliknya, ketidakpastian dapat mendorong perusahaan menunda ekspansi atau mengutamakan efisiensi. Meskipun demikian, pengaruh kondisi ekonomi terhadap tenaga kerja dapat bersifat tidak langsung dan memerlukan jeda waktu. Perusahaan yang memperoleh kontrak ekspor jangka menengah, misalnya, mungkin tetap mempertahankan produksi meskipun persepsi terhadap perekonomian sedang melemah. Sebaliknya, ekonomi yang dinilai membaik belum tentu segera meningkatkan perekrutan apabila permintaan produk, kapasitas mesin, atau pasokan bahan baku belum mendukung.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kebijakan ekspor kayu dan kondisi perekonomian terhadap kesempatan kerja pada industri pengolahan kayu di Jawa Timur. Kebaruan praktis penelitian terletak pada penempatan persepsi pelaku industri sebagai dasar untuk membaca hubungan kebijakan perdagangan, lingkungan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja pada tingkat usaha. Pertanyaan penelitian diarahkan pada tiga hal, yaitu apakah kebijakan ekspor kayu berpengaruh terhadap kesempatan kerja, apakah kondisi perekonomian berpengaruh terhadap kesempatan kerja, dan apakah kedua variabel secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan kesempatan kerja. Hasil penelitian diharapkan membantu perumusan kebijakan ekspor yang lebih terukur dan memberikan masukan bagi perusahaan dalam menyelaraskan strategi produksi, pasar, serta kebutuhan tenaga kerja.

2. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei. Unit analisis mencakup pelaku usaha, pekerja, dan pihak yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas industri pengolahan kayu di Jawa Timur. Sampel berjumlah 61 responden dan dipilih menggunakan purposive sampling agar responden yang terlibat mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan kegiatan produksi, ekspor, kondisi usaha, dan kesempatan kerja. Pendekatan survei digunakan untuk memperoleh gambaran terukur mengenai persepsi responden terhadap variabel penelitian. Prosedur kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengujian hubungan antarvariabel melalui estimasi koefisien regresi dan pengujian hipotesis secara statistik [18], [19].

Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 5. Variabel kebijakan ekspor kayu (X1) menggambarkan persepsi mengenai dukungan, kemudahan, kepastian, dan relevansi kebijakan ekspor bagi aktivitas industri. Variabel kondisi perekonomian (X2) merepresentasikan persepsi terhadap stabilitas dan lingkungan ekonomi yang memengaruhi kegiatan usaha. Variabel kesempatan kerja (Y) menggambarkan kecenderungan peningkatan kebutuhan tenaga kerja, pembukaan posisi kerja, atau pemeliharaan kapasitas penyerapan tenaga kerja dalam industri pengolahan kayu. Definisi operasional tersebut digunakan untuk menjaga konsistensi antara tujuan, instrumen, dan interpretasi hasil.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Peran	Fokus Pengukuran	Skala
Kebijakan Ekspor Kayu (X1)	Independen	Kemudahan, kepastian, dukungan, dan akses kebijakan ekspor	Likert 1–5
Kondisi Perekonomian (X2)	Independen	Stabilitas dan lingkungan ekonomi yang memengaruhi operasi usaha	Likert 1–5
Kesempatan Kerja (Y)	Dependen	Peningkatan kebutuhan, pembukaan, dan pemeliharaan tenaga kerja	Likert 1–5

Analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif, pengujian reliabilitas, regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Model penelitian dirumuskan sebagai $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$, dengan Y sebagai kesempatan kerja, a sebagai konstanta, b_1 dan b_2 sebagai koefisien regresi, serta e sebagai galat. Uji t digunakan untuk menilai pengaruh parsial setiap variabel independen, sedangkan uji F digunakan untuk menilai kelayakan pengaruh simultan. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui proporsi variasi kesempatan kerja yang dapat dijelaskan oleh model. Keputusan signifikansi didasarkan pada tingkat kesalahan 5 persen.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Statistik Deskriptif dan Reliabilitas

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata persepsi responden terhadap kebijakan ekspor kayu adalah 3,42. Nilai tersebut menunjukkan kecenderungan respons yang cukup positif, meskipun belum menggambarkan penerimaan yang sepenuhnya kuat. Kondisi perekonomian memperoleh rata-rata tertinggi, yaitu 3,89, sedangkan

kesempatan kerja memiliki rata-rata 3,40. Pola ini memperlihatkan bahwa responden menilai lingkungan ekonomi relatif cukup baik, tetapi peningkatan kesempatan kerja belum berada pada tingkat yang sama. Perbedaan rata-rata tersebut penting karena menandakan bahwa persepsi ekonomi yang positif tidak selalu langsung diterjemahkan menjadi perekrutan tenaga kerja.

Tabel 2. Statistik Deskriptif dan Reliabilitas

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Cronbach Alpha
Kebijakan Ekspor Kayu (X1)	61	2,00	4,33	3,42	0,544
Kondisi Perekonomian (X2)	61	1,67	5,00	3,89	0,805
Kesempatan Kerja (Y)	61	2,00	5,00	3,40	0,802

Nilai Cronbach Alpha untuk kondisi perekonomian dan kesempatan kerja masing-masing sebesar 0,805 dan 0,802, sehingga keduanya menunjukkan konsistensi internal yang baik. Nilai reliabilitas kebijakan ekspor kayu sebesar 0,544 lebih rendah daripada batas 0,60 yang sering digunakan dalam penelitian eksploratif. Oleh karena itu, hasil yang berkaitan dengan X1 tetap dapat dibaca sebagai indikasi empiris, tetapi perlu ditafsirkan secara hati-hati. Nilai tersebut juga menunjukkan perlunya penyempurnaan butir instrumen pada penelitian lanjutan agar seluruh dimensi kebijakan, seperti kemudahan prosedur, biaya kepatuhan, akses informasi, insentif, dan kepastian regulasi, terukur dengan konsistensi yang lebih kuat.

3.2. Analisis Regresi dan Uji Parsial

Hasil regresi menghasilkan persamaan $Y = 0,600 + 0,987X1 - 0,147X2$. Koefisien kebijakan ekspor kayu bernilai positif sebesar 0,987, sedangkan koefisien kondisi perekonomian bernilai negatif sebesar 0,147. Koefisien positif X1 menunjukkan bahwa peningkatan persepsi terhadap kualitas kebijakan ekspor berkaitan dengan peningkatan kesempatan kerja. Sebaliknya, arah negatif X2 tidak dapat langsung dimaknai sebagai dampak ekonomi yang merugikan karena hasil pengujiannya tidak signifikan. Arah tersebut lebih tepat diperlakukan sebagai pola pada sampel yang belum cukup kuat untuk digeneralisasi.

Tabel 3. Hasil Regresi Linear Berganda dan Uji t

Variabel	Koefisien	t hitung	Signifikansi	Keputusan
Konstanta	0,600	–	–	–
Kebijakan Ekspor Kayu (X1)	0,987	6,534	0,000	Signifikan
Kondisi Perekonomian (X2)	-0,147	-1,324	0,191	Tidak signifikan

Uji parsial menunjukkan bahwa kebijakan ekspor kayu memiliki nilai t sebesar 6,534 dengan signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, hipotesis mengenai pengaruh kebijakan ekspor kayu diterima. Kondisi perekonomian memperoleh nilai t sebesar -1,324 dengan signifikansi 0,191, sehingga hipotesis pengaruh parsial kondisi perekonomian tidak didukung. Perbedaan hasil ini mengisyaratkan bahwa keputusan tenaga kerja pada industri pengolahan kayu dalam sampel lebih dekat dengan faktor yang secara langsung mengatur akses pasar dan kelancaran ekspor daripada dengan penilaian umum mengenai keadaan ekonomi.

3.3. Uji Simultan dan Koefisien Determinasi

Tabel 4. Uji F dan Koefisien Determinasi

Indikator	Nilai	Signifikansi	Interpretasi
F hitung	22,470	0,000	Model signifikan secara simultan
R-squared / Adjusted R-squared	0,437 / 0,417	–	Daya jelas model 43,7 persen

Nilai F sebesar 22,470 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa kebijakan ekspor kayu dan kondisi perekonomian secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesempatan kerja. Nilai R-squared sebesar 0,437 berarti 43,7 persen variasi kesempatan kerja dapat dijelaskan oleh kedua variabel dalam model. Sisanya sebesar 56,3 persen berkaitan dengan faktor lain yang tidak dimasukkan, antara lain skala usaha, investasi mesin, teknologi, produktivitas, ketersediaan bahan baku, upah, keterampilan pekerja, kontrak pesanan, akses pembiayaan, dan strategi perusahaan. Adjusted R-squared sebesar 0,417 memperlihatkan bahwa kemampuan penjelasan model tetap cukup berarti setelah mempertimbangkan jumlah prediktor.

3.4. Makna Statistik Deskriptif bagi Dinamika Industri

Rata-rata kebijakan ekspor kayu sebesar 3,42 memperlihatkan bahwa responden cenderung menilai kebijakan ekspor secara positif, tetapi ruang perbaikan masih cukup besar. Nilai rata-rata yang belum mendekati skor

maksimum dapat mencerminkan perbedaan pengalaman antarperusahaan. Perusahaan yang telah memiliki dokumen legalitas, tenaga administrasi, jaringan pembeli, dan pengalaman pengiriman mungkin merasakan manfaat kebijakan secara lebih langsung. Sebaliknya, usaha dengan kapasitas terbatas dapat menghadapi biaya belajar, kebutuhan sertifikasi, perubahan prosedur, atau kesulitan memperoleh informasi. Literatur mengenai legalitas kayu Indonesia juga menjelaskan bahwa tata kelola ekspor perlu tetap menjamin kredibilitas produk tanpa membebani pelaku kecil secara tidak proporsional [1]. Dengan demikian, penilaian responden bukan hanya berkaitan dengan arah kebijakan, tetapi juga dengan kemudahan penerapan pada tingkat perusahaan.

Rata-rata kondisi perekonomian sebesar 3,89 merupakan nilai tertinggi di antara variabel penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa responden secara umum menangkap adanya lingkungan ekonomi yang cukup mendukung. Namun, kesempatan kerja hanya memperoleh rata-rata 3,40. Selisih tersebut menegaskan bahwa persepsi atas perbaikan ekonomi tidak selalu beriringan dengan penambahan tenaga kerja. Perusahaan dapat merespons peluang pasar dengan meningkatkan jam kerja, memperbaiki produktivitas, menggunakan pekerja yang tersedia, melakukan subkontrak, atau menambah mesin sebelum membuka posisi baru. Pada industri dengan persaingan biaya tinggi, peningkatan penjualan bahkan dapat diikuti strategi efisiensi agar margin tetap terjaga. Oleh sebab itu, indikator ekonomi makro dan persepsi kesempatan kerja sebaiknya dibaca sebagai dua proses yang saling berkaitan tetapi tidak identik.

Nilai rata-rata kesempatan kerja sebesar 3,40 menunjukkan kecenderungan peningkatan yang moderat. Posisi ini dapat diartikan bahwa responden melihat adanya peluang kerja, tetapi peningkatannya belum merata atau belum berlangsung kuat pada seluruh jenis pekerjaan. Industri pengolahan kayu membutuhkan kombinasi pekerjaan produksi, pengendalian mutu, pemeliharaan mesin, desain, administrasi, pemasaran, ekspor, dan logistik. Perubahan permintaan dapat meningkatkan kebutuhan pada sebagian fungsi terlebih dahulu. Sebagai contoh, pesanan ekspor yang memerlukan mutu dan dokumentasi lebih ketat dapat menambah kebutuhan tenaga pengendalian kualitas dan administrasi sebelum jumlah pekerja produksi berubah. Kajian mengenai pekerjaan sektor kehutanan juga menunjukkan pentingnya memperhatikan dimensi formal dan informal karena hubungan kerja dalam rantai usaha kehutanan tidak selalu tercatat dalam bentuk pekerjaan tetap [5].

Hasil deskriptif perlu dipahami dalam konteks komposisi sampel yang mencakup pelaku usaha, pekerja, dan pihak terkait. Masing-masing kelompok dapat menggunakan dasar penilaian yang berbeda. Pemilik usaha cenderung menilai kebijakan dari biaya, kelancaran, dan peluang pasar, sedangkan pekerja mungkin menilainya dari stabilitas jam kerja, pendapatan, atau keberlanjutan kontrak. Perbedaan tersebut dapat memperluas variasi jawaban sekaligus meningkatkan kekayaan perspektif. Namun, tanpa pemisahan analisis menurut kategori responden, hasil rata-rata belum menunjukkan kelompok mana yang paling optimistis atau paling menghadapi kendala. Penelitian berikutnya perlu membedakan responden berdasarkan skala usaha, jenis produk, orientasi pasar, status pekerjaan, dan pengalaman ekspor.

Secara keseluruhan, statistik deskriptif memberikan pesan bahwa kebijakan ekspor, keadaan ekonomi, dan kesempatan kerja dinilai cukup baik, tetapi ketiganya tidak bergerak dengan intensitas yang sama. Kebijakan ekspor tampak lebih dekat dengan perubahan kesempatan kerja dibandingkan persepsi ekonomi secara umum. Interpretasi ini konsisten dengan karakter industri pengolahan kayu yang bergantung pada pesanan, spesifikasi produk, legalitas, dan kepastian pengiriman. Statistik ekspor Jawa Timur yang disusun menurut kelompok barang, negara tujuan, berat, dan nilai menunjukkan pentingnya analisis yang lebih rinci menurut komoditas dan pasar tujuan [11]. Penggabungan data survei perusahaan dengan data ekspor resmi akan membantu menjelaskan apakah penilaian responden berhubungan dengan perubahan volume dan nilai ekspor yang benar-benar terjadi.

3.5. Pengaruh Kebijakan Ekspor Kayu terhadap Kesempatan Kerja

Koefisien kebijakan ekspor kayu sebesar 0,987 dan signifikansi 0,000 menunjukkan hubungan yang kuat dalam model penelitian. Secara substantif, hasil ini dapat dijelaskan melalui mekanisme perluasan pasar. Kebijakan yang memberikan kepastian prosedur, akses informasi, fasilitasi promosi, serta pengakuan legalitas membantu perusahaan menjangkau pembeli yang lebih luas. Ketika pesanan meningkat, perusahaan perlu menyesuaikan kapasitas produksi, jadwal kerja, dan fungsi pendukung. Penyesuaian tersebut membuka peluang perekrutan atau setidaknya mempertahankan tenaga kerja yang telah ada. Penelitian mengenai program promosi ekspor di Indonesia menunjukkan bahwa dukungan pemerintah dapat memperkuat sumber daya dan kapabilitas eksportir, strategi pemasaran, serta daya saing perusahaan [3]. Jalur peningkatan kapabilitas inilah yang memungkinkan kebijakan perdagangan memberikan dampak pada kegiatan produksi dan tenaga kerja.

Pengaruh kebijakan juga berlangsung melalui pengurangan ketidakpastian. Perusahaan akan lebih berhati-hati menambah pekerja apabila persyaratan ekspor sering berubah, waktu perizinan sulit diperkirakan, atau biaya kepatuhan tidak jelas. Sebaliknya, prosedur yang konsisten memungkinkan perusahaan menghitung biaya dan waktu pemenuhan pesanan. Kepastian tersebut penting karena keputusan perekrutan menimbulkan kewajiban jangka menengah, seperti upah, pelatihan, keselamatan kerja, dan pengawasan. Dengan demikian, kebijakan ekspor yang mudah dipahami dapat menurunkan risiko keputusan ekspansi. Data perusahaan eksportir Indonesia

juga menunjukkan bahwa strategi dan kinerja ekspor berkaitan dengan sumber daya organisasi, kapabilitas, serta dukungan program ekspor [4]. Kebijakan yang efektif seharusnya tidak berhenti pada penerbitan aturan, tetapi memastikan perusahaan mampu mengimplementasikannya.

Pada industri kayu, legalitas dan ketertelusuran merupakan bagian penting dari akses pasar. Sertifikasi yang dipercaya pembeli dapat berfungsi sebagai sinyal bahwa bahan baku dan proses produksi memenuhi persyaratan. Namun, manfaat tersebut dapat berkurang apabila biaya administrasi terlalu tinggi bagi usaha kecil. Kajian tentang lisensi legalitas kayu Indonesia menekankan perlunya penyesuaian kebijakan agar tujuan tata kelola tidak mengorbankan keberlangsungan industri skala kecil [1]. Temuan penelitian ini mendukung pandangan bahwa kebijakan ekspor dapat mendorong pekerjaan apabila desainnya menghasilkan akses pasar, bukan sekadar kewajiban dokumen. Fasilitasi bersama, layanan konsultasi, sistem digital yang sederhana, dan dukungan pembiayaan sertifikasi dapat memperluas jumlah usaha yang mampu memanfaatkan peluang ekspor.

Besarnya koefisien X_1 juga perlu ditempatkan secara proporsional karena variabel diukur berdasarkan persepsi. Koefisien tidak dapat langsung diartikan sebagai jumlah pekerja tertentu yang tercipta akibat satu kebijakan. Hasil tersebut menunjukkan perubahan skor kesempatan kerja yang berkaitan dengan perubahan skor persepsi kebijakan dalam model. Untuk memperkirakan dampak pekerjaan secara riil, penelitian lanjutan memerlukan data jumlah pekerja, status kerja, jam kerja, upah, nilai ekspor, dan kapasitas produksi sebelum serta sesudah perubahan kebijakan. Kajian global mengenai pekerjaan yang didukung ekspor memperlihatkan bahwa hubungan ekspor dan tenaga kerja dapat dihitung melalui keterkaitan produksi antarsektor [2]. Pendekatan tersebut dapat melengkapi hasil survei perusahaan.

Temuan signifikan X_1 memberikan implikasi bahwa pemerintah daerah dan pusat perlu memandang layanan ekspor sebagai bagian dari kebijakan ketenagakerjaan. Program ekspor yang hanya mengejar nilai transaksi tanpa memperhatikan kapasitas produksi lokal berpotensi menghasilkan manfaat tenaga kerja yang terbatas. Sebaliknya, promosi pasar yang disertai penguatan kualitas, desain, produktivitas, legalitas, dan manajemen pesanan dapat memperbesar kandungan nilai tambah domestik. Kementerian Perdagangan telah menjalankan pendampingan dan pencocokan bisnis bagi produk berbahan kayu, yang menunjukkan bahwa fasilitasi ekspor dapat diarahkan hingga tingkat perusahaan [16]. Agar berdampak lebih luas, pendampingan tersebut perlu terhubung dengan lembaga pelatihan, pembiayaan, pemerintah daerah, asosiasi usaha, dan penyedia logistik.

3.6. Kondisi Perekonomian yang Tidak Signifikan secara Parsial

Kondisi perekonomian memiliki koefisien $-0,147$ dengan signifikansi $0,191$. Karena tidak signifikan, arah negatif tersebut tidak cukup kuat untuk menyatakan bahwa perbaikan ekonomi menurunkan kesempatan kerja. Hasil ini lebih tepat dimaknai bahwa variasi persepsi kondisi ekonomi dalam sampel belum mampu menjelaskan variasi kesempatan kerja setelah pengaruh kebijakan ekspor diperhitungkan. Salah satu penjelasan yang mungkin adalah sifat variabel yang terlalu umum. Kondisi ekonomi mencakup banyak unsur, seperti inflasi, permintaan, nilai tukar, suku bunga, biaya energi, dan akses pembiayaan. Apabila seluruh unsur digabungkan dalam satu skor, pengaruh positif dan negatif antarindikator dapat saling menetralkan.

Penjelasan kedua berkaitan dengan jeda waktu. Perubahan ekonomi makro tidak selalu segera diikuti perubahan jumlah tenaga kerja. Perusahaan biasanya menunggu kepastian pesanan sebelum merekrut, sedangkan proses perekrutan, pelatihan, dan penempatan membutuhkan waktu. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat merespons permintaan dengan lembur, penataan ulang pekerjaan, atau subkontrak. Dampak terhadap jumlah pekerja baru mungkin muncul setelah kapasitas yang ada benar-benar mencapai batas. Karena penelitian menggunakan survei pada satu periode, hubungan yang memiliki jeda waktu sulit ditangkap. Data panel perusahaan dalam beberapa tahun akan lebih sesuai untuk menguji apakah perubahan pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan investasi mendahului perubahan tenaga kerja.

Penjelasan ketiga adalah dominannya faktor permintaan spesifik industri. Bagi perusahaan pengolahan kayu, kontrak dengan pembeli, jenis produk, ketersediaan bahan baku, dan standar kualitas mungkin lebih menentukan daripada persepsi ekonomi agregat. Perusahaan yang mempunyai kontrak ekspor tetap dapat menjaga produksi saat permintaan domestik melemah. Sebaliknya, ekonomi daerah yang membaik belum menjamin peningkatan pesanan untuk produk kayu tertentu. Kajian perdagangan pada industri pengolahan kayu menunjukkan bahwa kinerja industri dipengaruhi struktur perdagangan, produktivitas, dan posisi daya saing [6], [7]. Oleh karena itu, pengukuran kondisi ekonomi pada penelitian selanjutnya perlu memasukkan indikator yang lebih dekat dengan operasi perusahaan, seperti biaya input, kurs transaksi, tingkat pesanan, dan akses kredit.

Hasil tidak signifikan juga dapat berkaitan dengan strategi efisiensi. Ketika biaya bahan baku, energi, atau logistik meningkat, perusahaan dapat menahan perekrutan meskipun penjualan masih bertumbuh. Investasi mesin dan otomasi dapat meningkatkan output tanpa penambahan tenaga kerja dalam proporsi yang sama. Sebaliknya, usaha padat karya yang menggunakan proses manual dapat menambah pekerja lebih cepat. Variasi teknologi antarperusahaan menyebabkan respons terhadap kondisi ekonomi menjadi berbeda. Publikasi profil industri mikro

dan kecil Jawa Timur menyediakan konteks mengenai pekerja, pendapatan, pengeluaran, permodalan, kesulitan usaha, dan pemasaran berdasarkan kelompok industri [13]. Data seperti itu dapat digunakan untuk membedakan respons perusahaan menurut skala dan karakter produksi.

Walaupun tidak signifikan secara parsial, kondisi perekonomian tetap tidak boleh diabaikan dalam kebijakan. Variabel ini berkontribusi bersama kebijakan ekspor dalam model simultan. Lingkungan ekonomi menentukan biaya dan kelangsungan operasi, sedangkan kebijakan ekspor menentukan akses dan kepastian pasar. Kedua aspek dapat berinteraksi. Fasilitasi ekspor akan kurang efektif jika perusahaan tidak memiliki modal kerja, menghadapi biaya logistik tinggi, atau kesulitan memperoleh bahan baku. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang stabil belum cukup tanpa kebijakan yang membuka pasar. Oleh sebab itu, hasil penelitian tidak menyatakan bahwa ekonomi tidak penting, melainkan menunjukkan bahwa pengaruh langsungnya terhadap kesempatan kerja belum terbukti pada sampel dan spesifikasi model ini.

3.7. Pengaruh Simultan dan Daya Jelaskan Model

Uji F menunjukkan bahwa kebijakan ekspor kayu dan kondisi perekonomian secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja. Temuan ini memperlihatkan bahwa keputusan tenaga kerja tidak berdiri pada satu faktor. Kebijakan ekspor membentuk akses pasar dan aturan transaksi, sedangkan kondisi ekonomi membentuk biaya, daya beli, pembiayaan, dan tingkat risiko. Ketika keduanya bergerak mendukung, perusahaan memiliki alasan yang lebih kuat untuk meningkatkan produksi. Hubungan simultan juga menjelaskan mengapa kondisi perekonomian dapat tidak signifikan secara parsial tetapi tetap relevan dalam model bersama. Pengaruh suatu variabel dapat muncul melalui kombinasi dengan variabel lain, terutama pada proses bisnis yang saling tergantung.

Nilai R-squared sebesar 0,437 menunjukkan tingkat penjelasan yang cukup berarti untuk penelitian berbasis persepsi, tetapi belum mencakup sebagian besar variasi kesempatan kerja. Nilai ini menegaskan bahwa kesempatan kerja merupakan hasil dari sistem yang lebih luas. Faktor internal perusahaan, seperti ukuran usaha, produktivitas, struktur biaya, kualitas manajemen, teknologi, dan kapasitas produksi, dapat menentukan kemampuan perusahaan merespons peluang ekspor. Faktor eksternal lain mencakup ketersediaan bahan baku, upah minimum, infrastruktur, logistik, permintaan internasional, serta persaingan. Karena 56,3 persen variasi berada di luar model, kesimpulan kebijakan sebaiknya tidak hanya berfokus pada regulasi ekspor dan keadaan ekonomi.

Temuan ini sejalan dengan pendekatan rantai nilai. Ekspor produk kayu melibatkan input dari kehutanan, pengangkutan, pengolahan, pemasok bahan tambahan, jasa desain, sertifikasi, pergudangan, dan pelabuhan. Pekerjaan yang didukung ekspor dapat muncul di luar perusahaan eksportir utama. Metode input-output global menunjukkan bahwa ekspor menghasilkan kebutuhan tenaga kerja melalui hubungan langsung dan tidak langsung antarsektor [2]. Dengan demikian, survei terhadap pekerja dan pelaku usaha pengolahan kayu mungkin hanya menangkap sebagian dampak. Penelitian lanjutan dapat memperluas unit analisis hingga pemasok, perusahaan logistik, penyedia jasa sertifikasi, dan usaha pendukung untuk memperoleh estimasi kesempatan kerja yang lebih lengkap.

Adjusted R-squared sebesar 0,417 sedikit lebih rendah daripada R-squared, tetapi perbedaannya tidak besar. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan dua variabel independen masih memberikan informasi yang relevan, bukan hanya meningkatkan nilai penjelasan secara mekanis. Meski demikian, validitas model perlu diperkuat dengan ukuran sampel yang lebih besar dan instrumen kebijakan ekspor yang lebih reliabel. Data 61 responden memadai untuk analisis awal, tetapi keterwakilannya terhadap seluruh industri pengolahan kayu Jawa Timur belum dapat dipastikan tanpa informasi kerangka populasi. Survei lanjutan perlu menggunakan stratifikasi berdasarkan kabupaten atau kota, skala perusahaan, produk, dan orientasi pasar.

Secara kebijakan, hasil simultan menyarankan perlunya paket intervensi, bukan kebijakan tunggal. Fasilitasi ekspor perlu disertai akses pembiayaan, pelatihan, dukungan produktivitas, informasi pasar, dan penguatan logistik. Program promosi ekspor Indonesia terbukti berhubungan dengan kapabilitas dan daya saing perusahaan [3], tetapi manfaatnya akan lebih besar apabila perusahaan siap memenuhi permintaan. Bank, lembaga pelatihan, pemerintah daerah, dan asosiasi industri dapat berperan memastikan bahwa kenaikan pesanan tidak terhambat modal kerja atau kekurangan tenaga terampil. Pendekatan terpadu ini juga meningkatkan kemungkinan agar pertumbuhan transaksi ekspor berubah menjadi pekerjaan yang stabil dan berkualitas.

3.8. Mekanisme Transmisi Ekspor ke Penyerapan Tenaga Kerja

Hubungan antara kebijakan ekspor dan kesempatan kerja dapat dijelaskan sebagai rangkaian transmisi. Tahap pertama adalah peningkatan akses pasar. Informasi pasar, promosi, kemudahan dokumen, dan pengakuan legalitas mengurangi hambatan perusahaan untuk menawarkan produk kepada pembeli luar negeri. Tahap kedua adalah pembentukan pesanan yang dapat diprediksi. Pesanan yang lebih stabil memungkinkan perusahaan menyusun rencana produksi, kebutuhan bahan baku, dan jadwal tenaga kerja. Tahap ketiga adalah penyesuaian kapasitas

melalui tambahan shift, perekrutan, subkontrak, atau investasi. Dampak akhir terhadap pekerjaan bergantung pada pilihan penyesuaian kapasitas yang diambil perusahaan.

Pada perusahaan padat karya, kenaikan produksi cenderung lebih cepat meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Proses pemilahan bahan, perakitan, pengampelasan, finishing, pemeriksaan mutu, dan pengemasan masih membutuhkan tenaga manusia dalam jumlah besar. Pada perusahaan yang lebih terotomasi, kenaikan output dapat dicapai melalui peningkatan utilisasi mesin dan hanya menambah pekerjaan pada fungsi tertentu. Efisiensi perusahaan pengolahan kayu dipengaruhi penggunaan sumber daya, teknologi, dan organisasi produksi [7]. Oleh karena itu, kebijakan ekspor yang sama dapat menghasilkan dampak pekerjaan berbeda pada perusahaan yang berbeda. Evaluasi kebijakan perlu membedakan jumlah pekerjaan, jenis pekerjaan, tingkat keterampilan, serta status formal atau informal.

Tahap penting lainnya adalah penguatan kualitas produk. Pasar ekspor sering menuntut konsistensi ukuran, desain, ketahanan, keamanan, kemasan, dan ketepatan waktu. Upaya memenuhi persyaratan tersebut dapat menciptakan pekerjaan baru pada desain, pengendalian mutu, dokumentasi, dan pemasaran digital. Kajian kualitas ekspor furnitur kayu menunjukkan bahwa mutu produk merupakan bagian penting dari dinamika daya saing [8]. Dengan demikian, dampak kebijakan ekspor tidak terbatas pada pekerja produksi. Peningkatan ekspor juga dapat mengubah komposisi keterampilan yang dibutuhkan. Program pendidikan dan pelatihan perlu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan desain, mesin, legalitas, bahasa bisnis, dan perdagangan digital.

Transmisi ekspor ke pekerjaan juga dipengaruhi stabilitas pasokan bahan baku. Perusahaan tidak dapat memenuhi pesanan apabila bahan baku legal, sesuai mutu, dan tersedia tepat waktu tidak mencukupi. Gangguan pasokan dapat menurunkan utilisasi dan menyebabkan pekerjaan bersifat tidak stabil. Tata kelola legalitas yang baik perlu diikuti penguatan hubungan antara pemilik sumber bahan, pemasok, dan pengolah. Statistik produk hutan FAO dan laporan tren kayu tropis ITTO memperlihatkan bahwa produksi dan perdagangan produk kayu berada dalam pasar internasional yang terus berubah [14], [15]. Perusahaan Jawa Timur perlu mengantisipasi perubahan permintaan, harga, serta kebijakan di negara tujuan.

Tahap terakhir adalah distribusi manfaat. Pertumbuhan ekspor tidak otomatis meningkatkan kualitas pekerjaan jika kenaikan pendapatan hanya terserap pada biaya input atau margin usaha. Dampak yang berkelanjutan memerlukan produktivitas, keselamatan kerja, pelatihan, dan hubungan kerja yang layak. Kajian sektor kehutanan menunjukkan bahwa pekerjaan informal masih dominan pada banyak negara dan sering tidak tercakup secara memadai dalam data resmi [5]. Oleh sebab itu, indikator keberhasilan kebijakan sebaiknya mencakup jumlah pekerjaan baru, stabilitas jam kerja, status kontrak, peningkatan keterampilan, dan pendapatan. Pendekatan tersebut memastikan bahwa tujuan ekspor dan tujuan pembangunan tenaga kerja berjalan searah.

3.9. Tata Kelola Legalitas, Daya Saing, dan Beban Kepatuhan

Tata kelola legalitas merupakan pembeda utama perdagangan produk kayu dibandingkan banyak komoditas manufaktur lain. Pembeli dan regulator menuntut bukti asal bahan, proses yang sah, dan kepatuhan terhadap persyaratan pasar. Bagi perusahaan yang telah siap, sistem legalitas dapat memperkuat reputasi dan mengurangi keraguan pembeli. Bagi perusahaan yang belum siap, sistem yang kompleks dapat menambah biaya dan waktu. Perdebatan mengenai lisensi legalitas kayu Indonesia menunjukkan bahwa penguatan tata kelola perlu disertai desain yang sensitif terhadap kondisi usaha kecil [1]. Hasil signifikan kebijakan ekspor dalam penelitian ini mendukung perlunya memperbaiki kualitas implementasi, bukan sekadar menambah atau mengurangi persyaratan.

Beban kepatuhan dapat ditekan melalui standarisasi prosedur, layanan satu pintu, sistem digital yang stabil, panduan sederhana, dan pendampingan. Perusahaan kecil sering tidak memiliki staf khusus untuk menangani dokumen ekspor. Ketika persyaratan tersebut di banyak lembaga, pemilik atau manajer harus mengalihkan waktu dari produksi dan pemasaran. Biaya kesempatan tersebut dapat mengurangi kemampuan perusahaan menambah pekerja. Dukungan kelompok, seperti sertifikasi bersama, klinik ekspor, dan pelatihan dokumentasi, dapat meningkatkan akses. Program promosi ekspor terbukti lebih bermanfaat ketika memperkuat kapabilitas internal perusahaan [3]. Karena itu, kualitas layanan pendampingan sama pentingnya dengan isi regulasi.

Daya saing tidak hanya ditentukan harga. Produk kayu bersaing melalui desain, mutu, keandalan pasokan, legalitas, dan kemampuan memenuhi spesifikasi. Kajian perdagangan furnitur kayu menunjukkan bahwa harga ekspor dan posisi keunggulan komparatif saling berkaitan, tetapi hasil berbeda antarnegara dan pasar [9]. Perusahaan Jawa Timur perlu memilih segmen yang sesuai dengan sumber daya dan keterampilannya. Persaingan pada produk standar bervolume besar menuntut efisiensi, sedangkan segmen khusus dapat mengandalkan desain dan pengerjaan. Kebijakan ekspor sebaiknya mendukung diversifikasi pasar dan produk agar perusahaan tidak terlalu bergantung pada satu pembeli atau negara tujuan.

Hubungan kebijakan perdagangan dan pekerjaan juga terlihat pada kebijakan pembatasan ekspor bahan mentah. Kajian lintas negara berkembang menemukan bahwa larangan ekspor kayu bulat dapat meningkatkan pekerjaan pada perusahaan pengolahan, meskipun hasilnya memerlukan kebijakan pendamping agar berkelanjutan

[10]. Temuan tersebut tidak berarti setiap pembatasan akan selalu efektif. Dampak bergantung pada pasokan bahan, kapasitas pengolahan, penegakan aturan, dan permintaan produk jadi. Bagi Jawa Timur, orientasi peningkatan nilai tambah perlu diikuti investasi produktivitas, mutu, dan akses pasar. Tanpa kemampuan menyerap bahan dan menjual produk, pembatasan ekspor bahan mentah dapat menimbulkan distorsi.

Tata kelola yang baik juga memerlukan evaluasi berbasis data. Pemerintah dapat memadukan data ekspor berdasarkan HS, data industri, data pekerja, dan data layanan perizinan. Statistik ekspor Jawa Timur menyediakan dasar untuk mengidentifikasi jenis barang dan negara tujuan [11], sedangkan survei ketenagakerjaan menggambarkan struktur angkatan kerja daerah [12]. Integrasi data memungkinkan evaluasi apakah peningkatan ekspor produk kayu tertentu diikuti peningkatan pekerjaan pada wilayah produksi. Evaluasi tersebut akan lebih kuat daripada hanya mengukur jumlah dokumen atau peserta pelatihan. Indikator hasil perlu diarahkan pada transaksi berulang, peningkatan kapasitas, produktivitas, dan kualitas pekerjaan.

3.10. Implikasi bagi Industri Pengolahan Kayu Jawa Timur

Bagi pemerintah daerah, temuan penelitian menunjukkan bahwa dukungan ekspor dapat dijadikan instrumen penguatan industri dan kesempatan kerja. Peran pemerintah daerah tidak terbatas pada promosi pameran, tetapi juga pemetaan perusahaan, identifikasi produk potensial, penyediaan informasi standar pasar, dan koordinasi perizinan. Pemetaan sebaiknya membedakan perusahaan yang baru memulai ekspor, eksportir tidak langsung, dan eksportir berpengalaman. Setiap kelompok membutuhkan layanan berbeda. Pemula memerlukan literasi dasar dan pendampingan dokumen, sedangkan eksportir berpengalaman membutuhkan intelijen pasar, diversifikasi tujuan, dan dukungan peningkatan skala.

Bagi perusahaan, hasil penelitian menegaskan pentingnya membangun kesiapan internal sebelum mengejar pasar luar negeri. Kesiapan tersebut mencakup pencatatan biaya, standar mutu, jadwal produksi, legalitas bahan, kemampuan komunikasi, dan pengelolaan risiko pembayaran. Promosi ekspor hanya menghasilkan manfaat apabila perusahaan mampu memenuhi pesanan secara konsisten. Data survei eksportir Indonesia menunjukkan bahwa sumber daya organisasi, kapabilitas, strategi pemasaran, dan daya saing saling berkaitan [4]. Perusahaan juga perlu menghitung konsekuensi tenaga kerja sejak tahap negosiasi pesanan agar kenaikan volume tidak menimbulkan keterlambatan, penurunan mutu, atau tekanan kerja yang berlebihan.

Bagi lembaga pendidikan dan pelatihan, perubahan pasar ekspor membuka kebutuhan kompetensi baru. Industri tidak hanya membutuhkan operator produksi, tetapi juga tenaga desain, pengendalian mutu, pengelolaan mesin, dokumentasi legalitas, pemasaran digital, dan logistik. Pelatihan harus disusun bersama perusahaan agar materi sesuai dengan kebutuhan nyata. Model pelatihan berbasis proyek dapat menggunakan contoh spesifikasi pembeli, perhitungan kapasitas, penyusunan dokumen, dan pengendalian mutu. Hubungan antara sekolah, perguruan tinggi, balai latihan kerja, dan asosiasi industri dapat memperpendek kesenjangan keterampilan sekaligus meningkatkan peluang tenaga kerja lokal.

Bagi lembaga pembiayaan, ekspor menciptakan kebutuhan modal kerja karena perusahaan harus membeli bahan, membayar pekerja, dan memproduksi sebelum menerima pembayaran. Keterbatasan modal dapat membuat perusahaan menolak pesanan atau menambah pekerjaan secara informal. Produk pembiayaan yang mempertimbangkan kontrak dan siklus ekspor dapat membantu perusahaan mengubah pesanan menjadi produksi. World Bank Enterprise Survey Indonesia menyediakan kerangka data untuk memahami hambatan usaha, termasuk pembiayaan dan kondisi perusahaan [17]. Dukungan pembiayaan perlu dihubungkan dengan pendampingan manajemen risiko agar pertumbuhan tidak menimbulkan masalah arus kas.

Bagi asosiasi industri, peran kolektif diperlukan untuk mengatasi masalah yang sulit diselesaikan perusahaan secara sendiri. Asosiasi dapat menyediakan informasi pasar, pelatihan bersama, jejaring pemasok, dan advokasi kebijakan. Selain itu, asosiasi dapat memfasilitasi pemenuhan pesanan besar melalui kerja sama beberapa usaha. Kolaborasi tersebut perlu disertai standar mutu dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Laporan tren kayu tropis ITTO menunjukkan perlunya pelaku industri mengikuti perubahan pasar secara berkelanjutan [14]. Informasi yang cepat memungkinkan perusahaan menyesuaikan produk dan tenaga kerja sebelum perubahan pasar menimbulkan dampak yang lebih besar.

3.11. Kualitas Pekerjaan dan Keberlanjutan Industri

Peningkatan kesempatan kerja perlu dibedakan dari sekadar peningkatan jumlah orang yang bekerja. Pekerjaan yang berkelanjutan membutuhkan kepastian jam kerja, keselamatan, produktivitas, pendapatan yang memadai, dan peluang peningkatan keterampilan. Pada rantai industri kayu, sebagian pekerjaan dapat bersifat musiman atau berbasis pesanan. Ketika ekspor meningkat sementara, perusahaan mungkin menggunakan tenaga harian atau subkontrak. Strategi tersebut membantu fleksibilitas, tetapi manfaat pembangunan tenaga kerja menjadi terbatas apabila pekerja tidak memperoleh perlindungan dan pelatihan. Kajian pekerjaan informal sektor kehutanan menegaskan perlunya data dan kebijakan yang memperhatikan kualitas hubungan kerja [5].

Keberlanjutan pekerjaan juga berhubungan dengan keberlanjutan bahan baku. Industri yang berkembang tanpa pasokan legal dan terkelola akan menghadapi risiko produksi dan pasar. Sistem legalitas perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, bukan semata-mata biaya administrasi. Ketika legalitas meningkatkan kepercayaan pembeli dan akses pasar, perusahaan memperoleh dasar lebih kuat untuk mempertahankan produksi. Namun, manfaat tersebut harus dibagikan melalui produktivitas dan peningkatan kapasitas pekerja. Kebijakan yang menghubungkan legalitas, pengembangan pemasok, dan pelatihan tenaga kerja dapat menciptakan siklus yang lebih sehat antara sumber daya, industri, ekspor, dan pekerjaan.

Perubahan teknologi merupakan tantangan dan peluang. Mesin yang lebih efisien dapat mengurangi kebutuhan tenaga pada proses tertentu, tetapi menciptakan kebutuhan operator, teknisi, perencana produksi, dan pengendali mutu. Efisiensi tidak selalu berarti penurunan pekerjaan apabila perusahaan mampu memperluas pasar dan output. Penelitian mengenai efisiensi perusahaan pengolahan kayu menunjukkan pentingnya inovasi teknologi dan organisasi dalam meningkatkan daya saing [7]. Kebijakan tenaga kerja perlu membantu proses peralihan dengan pelatihan ulang, sehingga pekerja tidak tertinggal ketika perusahaan melakukan modernisasi.

Diversifikasi produk dapat memperkuat stabilitas pekerjaan. Perusahaan yang hanya menghasilkan satu produk untuk satu pasar lebih rentan terhadap perubahan permintaan. Pengembangan desain, produk bernilai tambah, dan pemanfaatan limbah dapat membuka sumber pendapatan baru. Mutu produk ekspor merupakan unsur penting dalam persaingan furnitur kayu [8]. Perusahaan perlu mengembangkan sistem pembelajaran dari umpan balik pembeli, tingkat penolakan, dan biaya mutu. Ketika kualitas meningkat, peluang pesanan berulang dan pekerjaan yang lebih stabil juga meningkat.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ekspor sebaiknya diukur melalui keseimbangan antara nilai ekonomi, tata kelola, dan manfaat sosial. Nilai ekspor yang meningkat merupakan indikator penting, tetapi belum cukup. Pemerintah dan industri perlu memantau nilai tambah lokal, produktivitas, jumlah pekerja, kualitas pekerjaan, dan keberlanjutan bahan baku. FAO menyediakan basis statistik produksi dan perdagangan hasil hutan yang dapat digunakan untuk melihat perubahan pasar jangka panjang [15]. Data global tersebut perlu dipadukan dengan data daerah dan perusahaan agar strategi Jawa Timur tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga sesuai dengan kekuatan lokal.

3.12. Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Lanjutan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, sampel berjumlah 61 responden dan dipilih secara purposif. Teknik tersebut sesuai untuk memperoleh informasi dari pihak yang relevan, tetapi membatasi generalisasi statistik terhadap seluruh perusahaan dan pekerja industri pengolahan kayu Jawa Timur. Penelitian berikutnya perlu menyusun kerangka sampel yang lebih jelas dan menggunakan stratifikasi wilayah, skala usaha, serta jenis produk. Dengan demikian, hasil dapat menunjukkan apakah dampak kebijakan berbeda antara usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.

Kedua, variabel diukur berdasarkan persepsi, sehingga hasil menggambarkan penilaian responden dan bukan perubahan objektif dalam jumlah pekerjaan atau nilai ekspor. Persepsi penting karena memengaruhi keputusan, tetapi dapat dipengaruhi pengalaman, posisi responden, dan kondisi saat survei. Penelitian lanjutan perlu menggabungkan kuesioner dengan data jumlah pekerja, jam kerja, status kontrak, upah, nilai penjualan, nilai ekspor, serta kapasitas produksi. Data tersebut memungkinkan pengujian apakah persepsi yang lebih positif benar-benar diikuti perubahan kinerja.

Ketiga, nilai reliabilitas variabel kebijakan ekspor kayu sebesar 0,544 menunjukkan konsistensi internal yang masih terbatas. Instrumen perlu diperbaiki dengan memisahkan dimensi kepastian regulasi, kemudahan prosedur, biaya kepatuhan, akses informasi, fasilitasi promosi, legalitas, dan dukungan pembiayaan. Uji coba instrumen, analisis faktor, dan evaluasi butir dapat digunakan untuk memastikan setiap indikator mengukur konstruk yang sama. Penyempurnaan ini penting karena kebijakan ekspor merupakan variabel yang paling kuat dalam model.

Keempat, kondisi perekonomian diukur sebagai konstruk umum. Hasil tidak signifikan mungkin terjadi karena unsur ekonomi yang berbeda memiliki arah pengaruh berbeda. Penelitian berikutnya dapat memasukkan nilai tukar, inflasi input, suku bunga, akses kredit, permintaan domestik, investasi, dan biaya logistik sebagai variabel terpisah. Desain longitudinal atau data panel juga dibutuhkan untuk menangkap jeda waktu antara perubahan ekonomi, pesanan, investasi, dan perekrutan. Pendekatan tersebut akan menghasilkan penjelasan yang lebih kuat daripada survei satu periode.

Kelima, model belum memasukkan teknologi, produktivitas, skala usaha, bahan baku, dan keterampilan. Nilai R-squared sebesar 0,437 menunjukkan bahwa faktor di luar model masih dominan. Penelitian lanjutan dapat menguji peran mediasi kinerja ekspor dan peningkatan kapasitas produksi, serta peran moderasi teknologi atau ukuran perusahaan. Analisis juga dapat membandingkan eksportir langsung, eksportir tidak langsung, dan perusahaan yang hanya melayani pasar domestik. Dengan rancangan tersebut, hubungan kebijakan ekspor, perekonomian, dan kesempatan kerja dapat dijelaskan melalui mekanisme yang lebih terukur.

3.13. Strategi Kebijakan Terpadu dan Tahapan Implementasi

Hasil penelitian dapat diterjemahkan ke dalam strategi kebijakan bertahap. Tahap awal adalah pemetaan kesiapan pelaku industri. Pemerintah perlu mengidentifikasi perusahaan berdasarkan skala, jenis produk, pengalaman ekspor, legalitas, kemampuan produksi, dan kebutuhan tenaga kerja. Pemetaan mencegah penggunaan program yang sama untuk semua perusahaan. Usaha yang belum pernah mengekspor membutuhkan penyederhanaan informasi dan pendampingan dasar, sedangkan eksportir yang telah berpengalaman membutuhkan dukungan diversifikasi pasar, kontrak jangka panjang, dan peningkatan produktivitas. Pendekatan yang tersegmentasi membuat anggaran pendampingan lebih tepat sasaran dan memperbesar peluang agar dukungan ekspor benar-benar diikuti aktivitas produksi.

Tahap kedua adalah penyederhanaan proses dan peningkatan kepastian layanan. Perusahaan perlu memperoleh daftar persyaratan yang jelas, waktu layanan yang terukur, dan saluran konsultasi yang mudah diakses. Digitalisasi dapat mengurangi pengulangan dokumen, tetapi sistem digital harus dirancang berdasarkan kemampuan pengguna. Layanan yang rumit hanya memindahkan hambatan dari proses tatap muka ke proses daring. Evaluasi layanan perlu mencatat waktu penyelesaian, jumlah koreksi, biaya yang dikeluarkan, dan masalah yang paling sering dialami perusahaan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki prosedur serta mengurangi ketidakpastian yang menghambat keputusan produksi dan perekrutan.

Tahap ketiga adalah menghubungkan kebijakan ekspor dengan penguatan kapasitas. Program promosi pasar perlu disertai penilaian kemampuan memenuhi pesanan. Ketika perusahaan memperoleh calon pembeli, pendampingan harus berlanjut pada perhitungan kapasitas, jadwal produksi, kebutuhan bahan baku, modal kerja, mutu, dan tenaga kerja. Program promosi ekspor Indonesia menunjukkan bahwa dukungan pemerintah lebih efektif ketika memperkuat sumber daya dan kapabilitas perusahaan [3]. Dengan demikian, indikator keberhasilan tidak hanya berupa pertemuan bisnis, tetapi juga pesanan yang terealisasi, pengiriman berulang, peningkatan kapasitas, dan pekerjaan yang tercipta atau dipertahankan.

Tahap keempat adalah penguatan ekosistem. Pemerintah daerah perlu mengoordinasikan dinas perdagangan, perindustrian, ketenagakerjaan, kehutanan, koperasi, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, dan asosiasi usaha. Koordinasi tersebut penting karena hambatan perusahaan sering berada pada beberapa bidang sekaligus. Sebuah perusahaan dapat memiliki produk yang diminati pembeli, tetapi terkendala modal kerja, keterampilan, atau pasokan legal. Penanganan yang terpisah menyebabkan peluang ekspor tidak berkembang menjadi produksi. Model layanan terpadu memungkinkan setiap masalah diarahkan kepada lembaga yang tepat tanpa membuat perusahaan mengulang proses dari awal.

Tahap kelima adalah evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Kebijakan perlu diuji berdasarkan perubahan kinerja, bukan hanya jumlah kegiatan. Statistik ekspor, data industri, dan data tenaga kerja dapat dipadukan untuk melihat perubahan menurut produk dan wilayah [11], [12], [13]. Perusahaan penerima program juga dapat dipantau selama beberapa periode untuk mengetahui keberlanjutan pesanan dan pekerjaan. Evaluasi semacam ini membantu membedakan program yang menghasilkan transaksi sesaat dari program yang membangun kemampuan jangka panjang. Hasil evaluasi kemudian menjadi dasar untuk memperbaiki desain, sasaran, dan bentuk pendampingan.

3.14. Kerangka Evaluasi Dampak terhadap Kesempatan Kerja

Evaluasi dampak kebijakan ekspor terhadap kesempatan kerja perlu menggunakan indikator yang terukur. Indikator pertama adalah perubahan jumlah pekerja sebelum dan sesudah perusahaan memperoleh fasilitas atau pesanan ekspor. Perubahan tersebut perlu dibedakan menurut pekerja tetap, kontrak, harian, dan subkontrak agar tidak terjadi kesimpulan yang terlalu sederhana. Peningkatan jumlah pekerja tetap menunjukkan komitmen jangka menengah, sedangkan peningkatan pekerja harian dapat mencerminkan kenaikan pesanan yang belum stabil. Kedua bentuk pekerjaan tetap relevan, tetapi memiliki implikasi kesejahteraan dan keberlanjutan yang berbeda.

Indikator kedua adalah intensitas kerja, yang dapat diukur melalui jam kerja, jumlah shift, utilisasi kapasitas, dan frekuensi pesanan. Perusahaan mungkin tidak menambah jumlah pekerja, tetapi meningkatkan jam kerja dan pendapatan. Dalam keadaan lain, perusahaan dapat meningkatkan output melalui mesin tanpa perubahan tenaga kerja. Karena itu, evaluasi perlu menggabungkan jumlah pekerja dengan produktivitas dan jam kerja. Pendekatan ini membantu menilai apakah kenaikan ekspor menciptakan pekerjaan baru, memperkuat pekerjaan yang ada, atau terutama meningkatkan efisiensi modal.

Indikator ketiga adalah kualitas pekerjaan. Pengukuran dapat mencakup pendapatan, keselamatan, pelatihan, status kontrak, dan peluang peningkatan keterampilan. Kebijakan ekspor yang berhasil seharusnya tidak hanya meningkatkan volume produksi, tetapi juga mendorong perusahaan membangun sistem mutu dan keterampilan. Kebutuhan pasar ekspor dapat menciptakan pekerjaan yang lebih kompleks pada desain, dokumentasi, dan pengendalian mutu. Namun, proses tersebut harus diikuti pelatihan agar pekerja lokal mampu mengisi posisi yang muncul. Tanpa pelatihan, perusahaan mungkin mencari tenaga dari luar atau mengandalkan sedikit pekerja berpengalaman.

Indikator keempat adalah keberlanjutan dampak. Perusahaan perlu dipantau setelah satu atau dua siklus pesanan untuk mengetahui apakah pekerjaan tetap bertahan. Pesanan pertama sering memerlukan penyesuaian besar, sedangkan pesanan berulang menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi mutu, waktu, dan biaya. World Bank Enterprise Survey dapat menjadi rujukan untuk membangun pengukuran kendala dan karakteristik perusahaan [17]. Pada tingkat daerah, survei khusus dapat menghubungkan data layanan ekspor, transaksi, kapasitas, dan tenaga kerja sehingga hubungan sebab-akibat dapat diuji dengan lebih baik.

Indikator kelima adalah distribusi manfaat dalam rantai pasok. Pekerjaan yang didukung ekspor dapat muncul pada pemasok bahan, pengangkutan, pengemasan, dan jasa pendukung, bukan hanya di perusahaan utama. Oleh karena itu, evaluasi sebaiknya mengidentifikasi keterkaitan lokal dan nilai belanja perusahaan kepada pemasok daerah. Semakin besar kandungan lokal, semakin luas manfaat tenaga kerja yang tercipta. Kerangka evaluasi yang mencakup jumlah, intensitas, kualitas, keberlanjutan, dan distribusi pekerjaan akan memberikan gambaran lebih lengkap mengenai efektivitas kebijakan ekspor bagi pembangunan industri Jawa Timur.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan ekspor kayu berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesempatan kerja pada industri pengolahan kayu di Jawa Timur. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang memberikan kepastian, kemudahan, akses pasar, dan dukungan ekspor berhubungan dengan kemampuan perusahaan mempertahankan atau meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Kondisi perekonomian tidak berpengaruh signifikan secara parsial, sehingga perubahan persepsi ekonomi belum terbukti secara langsung menjelaskan kesempatan kerja pada sampel penelitian. Namun, kebijakan ekspor kayu dan kondisi perekonomian secara simultan berpengaruh signifikan. Model mampu menjelaskan 43,7 persen variasi kesempatan kerja, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. Implikasi utama penelitian adalah perlunya kebijakan ekspor yang konsisten, sederhana, berorientasi pada legalitas dan nilai tambah, serta terhubung dengan pembiayaan, peningkatan produktivitas, pelatihan tenaga kerja, dan penguatan rantai pasok. Hasil perlu ditafsirkan dengan mempertimbangkan ukuran sampel, penggunaan data persepsi, dan reliabilitas variabel kebijakan ekspor yang masih terbatas. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan sampel yang lebih luas, data objektif perusahaan, desain longitudinal, serta variabel teknologi, produktivitas, skala usaha, bahan baku, dan keterampilan.

Referensi

- [1] A. Maryudi, D. Laraswati, M. A. K. Sahide, and L. Giessen, "Mandatory legality licensing for exports of Indonesian timber products: Balancing the goals of forest governance and timber industries," *Forest Policy and Economics*, vol. 124, art. 102384, 2021, doi: 10.1016/j.forpol.2020.102384.
- [2] M. Llop, "Quantifying the employment impacts of gross exports: A global accounting perspective," *Journal of Economic Structures*, vol. 11, art. 25, 2022, doi: 10.1186/s40008-022-00285-5.
- [3] U. Heriqbaldi, M. A. Esquivias, B. R. Samudro, and W. Widodo, "Do national export promotion programs in Indonesia support export competitiveness?" *Heliyon*, vol. 9, no. 6, art. e16918, 2023, doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e16918.
- [4] U. Heriqbaldi et al., "Survey data on organizational resources and capabilities, export marketing strategy, export competitiveness, and firm performance in exporting firms in Indonesia," *Data in Brief*, vol. 48, art. 109112, 2023, doi: 10.1016/j.dib.2023.109112.
- [5] S. Cui, R. S. Lippe, and J. Schweinle, "Informal employment in the forest sector: A scoping review," *Forests*, vol. 13, no. 3, art. 460, 2022, doi: 10.3390/f13030460.
- [6] A. Sujová, L. Šimanová, V. Kupčák, J. Schmidtová, and A. Lukáčiková, "Effects of foreign trade on the economic performance of industries—Evidence from wood processing industry of Czechia and Slovakia," *Economies*, vol. 9, no. 4, art. 180, 2021, doi: 10.3390/economies9040180.
- [7] S. Krišťáková et al., "Efficiency of wood-processing enterprises—Evaluation based on DEA and MPI: A comparison between Slovakia and Bulgaria for the period 2014–2018," *Forests*, vol. 12, no. 8, art. 1026, 2021, doi: 10.3390/f12081026.
- [8] L. Wan, N. Ban, Y. Fu, and L. Yuan, "Product quality measurement, dynamic changes, and the Belt and Road Initiative distribution characteristics: Evidence from Chinese wooden furniture exports," *Forests*, vol. 13, no. 7, art. 1153, 2022, doi: 10.3390/f13071153.
- [9] "The comparative advantages in the wooden furniture industry: Does the export price matter?" *Competitiveness Review*, vol. 33, no. 6, pp. 1145–1160, 2022, doi: 10.1108/CR-03-2022-0045.
- [10] S. Marchand and M. Zerbo, "Enhancing employment through log export ban: Insights from wood-processing firms in developing countries," *Forest Policy and Economics*, vol. 174, art. 103491, 2025, doi: 10.1016/j.forpol.2025.103491.
- [11] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Statistik Ekspor Provinsi Jawa Timur 2024*. Surabaya, Indonesia: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025.
- [12] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur Agustus 2023*. Surabaya, Indonesia: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024.
- [13] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Jawa Timur 2023 dan 2024*. Surabaya, Indonesia: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025.
- [14] F. Maplesden, *Tropical Timber Trends*, ITTO Technical Series No. 52. Yokohama, Japan: International Tropical Timber Organization, 2024.
- [15] Food and Agriculture Organization of the United Nations, "FAOSTAT Forestry Production and Trade Database," Rome, Italy, 2024.
- [16] Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Pelepasan ekspor produk furnitur berbahan kayu ke Korea Selatan," Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan, 2024.
- [17] World Bank, *Indonesia Enterprise Survey 2023*. Washington, DC, USA: World Bank Group, 2025.

- [18] I. Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS, 10th ed. Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021.
- [19] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2022.